



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2021 Nomor 8);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
5. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
14. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
16. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
18. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.
19. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.
20. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
21. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
22. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah
23. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
24. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
25. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk

mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

26. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp2.684.907.391.438,00 bertambah sejumlah Rp347.092.592.914,00 sehingga menjadi Rp3.031.999.984.352,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah
- | | |
|--|------------------------|
| 1. Semula | Rp2.684.907.391.438,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp281.825.800.256,00 |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp2.966.733.191.694,00 |
- b. Belanja Daerah
- | | |
|---|------------------------|
| 1. Semula | Rp2.662.907.391.438,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp348.092.592.914,00 |
| Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan | Rp3.010.999.984.352,00 |
- c. Pembiayaan Daerah :
1. Penerimaan
- | | |
|--|---------------------|
| a) Semula | Rp0,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp65.266.792.658,00 |
| Jumlah Pembiayaan Daerah setelah perubahan | Rp65.266.792.658,00 |
2. Pengeluaran
- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| a) Semula | Rp22.000.000.000,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp(1.000.000.000,00) |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | Rp21.000.000.000,00 |
- Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp44.266.792.658,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp0,00 -

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
- | | |
|---|----------------------|
| 1. Semula | Rp406.691.817.027,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp145.305.677.401,00 |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | Rp551.997.494.428,00 |
- b. Pendapatan transfer
- | | |
|--|------------------------|
| 1. Semula | Rp2.268.464.231.911,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp136.520.122.855,00 |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | Rp2.404.984.354.766,00 |
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp9.751.342.500 00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan
Rp9.751.342.500,00

Pasal 4

- 1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
 - a. Pajak daerah
 - (1) Semula Rp103.386.000.000,00
 - (2) Bertambah/(berkurang) Rp27.918.000.000,00Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp131.304.000.000,00
 - b. Retribusi daerah
 - (1) Semula Rp84.305.234.244,00
 - (2) Bertambah/(berkurang) Rp91.493.923.160,00Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp175.799.157.404,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - (1) Semula Rp6.363.701.269,00
 - (2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp6.363.701.269,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - (1) Semula Rp212.636.881.514,00
 - (2) Bertambah/(berkurang) Rp25.893.754.242,00Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp238.530.635.755,00
- 2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
 - a. Transfer ke Daerah
 - (1) Semula Rp2.138.807.294.732,00
 - (2) Bertambah/(berkurang) Rp23.394.551.555,00Jumlah transfer ke Daerah setelah perubahan Rp2.162.201.846.287,00
 - b. Transfer antar daerah
 - (1) Semula Rp129.656.937.179,00
 - (2) Bertambah/(berkurang) Rp113.125.571.300,00Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp242.782.508.479,00
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
 - a. Pendapatan hibah
 - (1) Semula Rp9.751.342.500,00
 - (2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00Jumlah hibah setelah perubahan Rp9.751.342.500,00
 - b. Dana Darurat
 - (1) Semula Rp0,00
 - (2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp0,00
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (1) Semula Rp0,00
 - (2) bertambah/(berkurang) Rp0,00Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan Rp0,00

Pasal 5

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- a. Belanja operasional
 - 1) Semula Rp1.910.374.764.930,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp292.833.219.511,00
 - Jumlah belanja operasional setelah Perubahan Rp2.203.207.984.441,00
- b. Belanja modal
 - 1) Semula Rp300.475.535.308,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp37.552.041.782,00
 - Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp338.027.577.090,00
- c. Belanja tidak terduga
 - 1) Semula Rp11.035.429.600,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp1.823.987.078,00
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp12.859.416.678,00
- d. Belanja transfer
 - 1) Semula Rp441.021.661.600,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp15.883.344.543,00
 - Jumlah belanja transfer setelah Perubahan Rp456.905.006.143,00

Pasal 6

- 1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai
 - (1) Semula Rp1.093.711.807.225,00
 - (2) Bertambah/(berkurang) Rp129.664.775.264,00
 - Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan Rp1.223.376.582.489,00
 - b. Belanja barang dan jasa
 - (1) Semula Rp737.057.420.455,00
 - (2) Bertambah/(berkurang) Rp152.655.224.247,00
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp889.712.644.702,00
 - c. Belanja bunga
 - (1) Semula Rp0,00
 - (2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp0,00
 - d. Belanja subsidi
 - (1) Semula Rp0,00
 - (2) Bertambah/(berkurang) Rp1.444.650.000,00
 - Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp1.444.650.000,00
 - e. Belanja hibah
 - (1) Semula Rp63.497.645.250,00
 - (2) Bertambah/(berkurang) Rp8.625.270.000,00
 - Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp72.122.915.250,00
 - f. Belanja bantuan sosial
 - (1) Semula Rp16.107.892.000,00
 - (2) Bertambah/(berkurang) Rp443.300.000,00
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp16.551.192.000,00

- 2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah

(1) Semula	Rp35.434.000.000,00
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp(1.555.100.000,00)
Jumlah belanja modal tanah setelah Perubahan	Rp33.878.900.000,00
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin

(1) Semula	Rp75.393.446.154,00
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp2.328.012.399,00
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah Perubahan	Rp77.721.458.553,00
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung

(1) Semula	Rp71.370.092.700,00
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp7.445.078.478,00
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah Perubahan	Rp78.815.171.178,00
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

(1) Semula	Rp89.466.786.454,00
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp29.268.063.200,00
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah Perubahan	Rp118.734.849.654,00
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya

(1) Semula	Rp28.811.210.000,00
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp65.987.705,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan	Rp28.877.197.705,00
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud

(1) Semula	Rp0,00
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah Perubahan	Rp0,00
- 3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | |
|--|---------------------|
| (1) Semula | Rp11.035.429.600,00 |
| (2) Bertambah/(berkurang) | Rp1.823.987.078,00 |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan | Rp12.859.416.678,00 |
- 4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil

(1) Semula	Rp8.000.000.000,00
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp8.063.298.143,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp16.063.298.143,00
 - b. Belanja bantuan keuangan

(1) Semula	Rp433.021.661.600
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp7.820.046.400,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp440.841.708.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp65.266.792.658,00Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan Rp65.266.792.658,00
- b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp22.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp(1.000.000.000,00)Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp21.000.000.000,00

Pasal 8

- 1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari atas:
 - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
 - (1) Semula Rp0,00
 - (2) Bertambah/(berkurang) Rp65.266.792.658,00Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp65.266.792.658,00
 - b. Pencairan dana cadangan
 - (1) Semula Rp0,00
 - (2) bertambah /(berkurang) Rp0,00Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp0,00
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - (1) Semula Rp0,00
 - (2) bertambah/(berkurang) Rp0,00Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp0,00
 - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
 - (1) Semula Rp0,00
 - (2) bertambah/(berkurang) Rp0,00Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp0,00
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
 - (1) Semula Rp0,00
 - (2) bertambah/(berkurang) Rp0,00Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan Rp0,00
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (1) Semula Rp0,00
 - (2) bertambah Rp0,00Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan Rp0,00
- 2) Pengeluaran sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan
 - (1) Semula Rp15.000.000.000,00
 - (2) Bertambah Rp0,00Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp.15.000.000.000,00

- b. Penyertaan modal daerah
 - (1) Semula Rp7.000.000.000,00
 - (2) bertambah Rp(1.000.000.000,00)
 - Jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan Rp6.000.000.000,00
- c. Pembayaran cicilan pokok utang
 - (1) Semula Rp0,00
 - (2) Bertambah Rp0,00
 - Jumlah pembayaran cicilan pokok utang setelah perubahan Rp0,00
- d. Pemberian pinjaman daerah
 - (1) Semula Rp0,00
 - (2) bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah pinjaman daerah Setelah Perubahan Rp0,00
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (1) Semula Rp0,00
 - (2) bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Setelah Perubahan Rp0,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; ;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

- k. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
- l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 10

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang merupakan landasan Operasional pelaksanaan Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal *20 Oktober 2022*



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal *21 Oktober 2022*



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR *8*
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT
(*B/195/2022*)